

Kejar Target Pendapatan Asli Daerah, Pemkot Makassar dan Bapenda Maros Maksimalkan Pajak Reklame



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/04/21/target-pad-2024-rp14-miliar-bapenda-maros-turunkan-paksa-reklame-ilegal>

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal memaksimalkan pajak reklame yang menempel di pertokoan. Itu dilakukan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Ia mengatakan, selama ini pajak reklame hanya untuk yang berada di jalan. Padahal potensi pajak reklame yang menempel di toko sangat bagus. Ia menyebut ada lebih seribu reklame di Makassar yang bisa dipunguti pajak. “Ada seribu sekian. Selama ini hanya reklame yang dipasang di pinggir jalan,” ungkapnya di Balai Kota Makassar, Senin (18/3/2024).

Untuk langkah awal, ia mengatakan pihaknya bakal melakukan pendataan reklame yang bisa dipunguti pajak. “Itu reklame di toko kadang besar juga. Itu yang melekat di bangunan. Di data dulu,” ujarnya. Selama ini, Danny mengatakan pihaknya tidak melihat hal tersebut sebagai potensi pendapatan. Kini, setelah ada arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memaksimalkan PAD, maka dasar hukum untuk memungut pajak dari hal tersebut lebih kuat.

Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros gencar menertibkan reklame liar di ruas jalan poros. Beberapa perusahaan memasang reklame tanpa sepengetahuan Bapenda. Ulah oknum perusahaan tersebut bisa berdampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maros tahun 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak
Bapenda Maros, Andi Akbar mengatakan, petugas reklame kini sedang aktif memantau. Reklame melanggar langsung diturunkan paksa. "Penertiban reklame liar yang dilaksanakan petugas pajak reklame. Kami tindak tegas," kata Andi Akbar. Ia menyebut, sejumlah reklame ilegal mulai terpasang jelang Idul Fitri. Bapenda menarget, PAD tahun 2024 mencapai Rp1,4 miliar.

Kini, Bapenda Maros dipimpin suami Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, Baso Arman. Baso Arman menggeser posisi Haji Takdir yang berhasil melampaui target PAD di tahun 2023. Bapenda Maros di tangan Haji Takdir mampu berkerja maksimal. Pasalnya, sebelas sumber pendapatan yang dikelola Bapenda melampaui target yang telah ditentukan. 11 sumber pajak yang dikelola Dispenda yakni parkir, restoran, reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Mineral Bukan Logam dan Batuan (BMLB), burung walet, Air bawah Tanah (ABT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan hiburan.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Andi Akbar klaim PAD yang dikelola Dispenda telah melampaui target. Target PAD Dispenda untuk tahun 2023 sebesar Rp 176.680.000.000. Namun realiasinya mencapai Rp 196.362.592.674. Andi Akbar menyampaikan realiasi PAD di Bapenda pada 2022 mencapai Rp 167.102.852.294. "Meningkat dari tahun 2022. Meningkatkan Rp29 Miliar lebih," kata dia.

Pasalnya, beberapa sumber pendapatan yang dikelola Bapenda melampaui target yang telah ditentukan. Setelah parkir, kini pajak restoran juga sudah melampaui target. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Andi Akbar mengatakan, realisasi pajak restoran tahun 2023 mencapai Rp20,4 miliar. Sementara target pajak restoran Rp19,5 miliar. Artinya realisasi dan target selisih Rp900 juta. "Kami lampau target untuk restoran. Target Rp19,5 miliar. Tapi realiasinya hampir Rp20, 5 miliar," kata Andi Akbar, Selasa (19/12/2023). Andi Akbar memastikan, Bapenda selalu transparan soal pendapatan yang dikelolanya.

Di Maros, hanya Bapenda yang selalu publikasikan hasil kinerjanya. Sementara OPD lain, belum pernah dilakukan. "Ini berkat kerjasama tim. Pak Haji Taktir juga terus mensupport dan evaluasi kinerja teman-teman. Hasilnya ada," kata dia. Sebelumnya, Bapenda juga klaim lampau target pajak parkir. Andi Akbar mengatakan, realisasi target pajak parkir tahun 2023 sudah melewati target, Rp200 juta. "Dengan target sebesar Rp12 miliar,

realisasi pajak parkir tahun ini mencapai Rp 12.202.633.200.101. Itu melebihi target yang ditetapkan," kata Andi Akbar, Senin (11/12/2023). "Realisasi kami khusus pajak mencapai 101,69 persen," ujar Andi Akbar dengan senyum.

Sumber Berita :

1. <https://sulsef.fajar.co.id/2024/03/18/genjot-pad-pemkot-makassar-bakal-maksimalkan-pajak-reklame-di-toko/> 18 Maret 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/21/target-pad-2024-rp14-miliar-bapenda-maros-turunkan-paksa-reklame-ilegal?page=2> 21 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.